

BAB III

KONSTRUKSI SEJARAH SUBJEKTIF PRAMOEDYA ANANTA TOER TENTANG *JUGUN IANFU* PADA *PRDCM* DAN REFLEKSI REALITAS SOSIAL MASA DOM DI ACEH

3.1 Konstruksi Sejarah Subjektif *Jugun Ianfu* dalam *PRDCM*

Sejarah subjektif adalah sebuah konstruk, bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita, cerita itu mencakup fakta-fakta yang terangkakan untuk menggambarkan gejala sejarah (Kartodirjo, 1992:14). Sejarah (peristiwa sejarah) memuat unsur-unsur dan isi subjek (pengarang). Baik pengetahuan maupun gambaran sejarah adalah hasil penggambaran atau rekonstruksi dari pengarang, maka mau tidak mau memuat sifat-sifatnya, gaya bahasanya, struktur pemikirannya, pandangannya, dan lain sebagainya, maka hal inilah yang disebut sejarah dalam arti subjektif (Kartodirjo, 1992:14). Fakta sejarah sebagai *actual occurrence* (kejadian aktual) merupakan fakta yang harus ditemukan, artinya fakta sejarah itu berada di dalam benak manusia dan dibuat oleh manusia (Kuntowijoyo, 1987:130).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus bahasan adalah fakta sejarah yang membentuk cerita *jugun ianfu*, yang dalam hal ini erat kaitannya dengan konstruksi totalitas pengarang yang terdiri dari realitas subjektif dan realitas objektif. Khusus untuk realitas subjektif bisa dilakukan dengan cara yaitu merekonstruksi pikiran-pikiran pengarang, khususnya yang dituangkan dalam

PRDCM, yang berkaitan dengan bahan baku sejarah yang menjadi ide cerita. Sedangkan realita objektif bisa ditelusuri lewat bukti-bukti sejarah yang ditemukan pada naskah sejarah yang mempunyai kompetensi dalam topik kajian sejarah serta kurun waktunya (misalnya sejarah pendudukan Jepang di Indonesia kurun waktu 1942-1945). Hubungan sejarah subjektif dengan totalitas terletak pada kesamaan memposisikan subjek (pengarang) dapat memproduksi sebuah cerita berdasarkan fakta kejadian, yang disebut realita subjektif.

Sebuah karya sastra juga mempunyai fungsi sebagai dokumen sosio budaya, termasuk sejarah. Dalam hal ini peranan karya sastra bukan berarti menggeser secara hierarkis sebuah disiplin ilmu sejarah dengan segala bentuknya ke dalam karya sastra, melainkan memberikan sumbangan terhadap sejarah melalui produk-produk karya sastra dengan tetap menampilkan ciri khas sebuah 'bangunan karya sastra'.

Sejarah sebagai sebuah ilmu dipandang sebagai sesuatu hal yang empiris, dikatakan oleh Kuntowijoyo bahwa ilmu sejarah termasuk ilmu-ilmu empiris (bahasa Yunani; *empiria* berarti pengalaman). Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam suatu dokumen (Kuntowijoyo, 1999:60).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kedekatan karakter keilmuan antara ilmu sastra dan sejarah terletak pada hal-hal yang sama-sama diambil atau digali dari pengalaman manusia. Hal-hal yang empirik menjadi dasar dalam proses kreatif keduanya, namun dalam proses selanjutnya sastra lebih mengarah

dalam unsur-unsur estetis, sedangkan sebuah naskah sejarah lebih kepada unsur obyektifitas sebuah fakta.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwa fakta sejarah merupakan bahan baku cerita dari novel sejarah. Tidak hanya memindah peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam cerita, namun memerlukan keterlibatan unsur-unsur internal (dalam diri pengarang) dalam bentuk perspektif, jiwa transenden yang mewarnai sekaligus memberikan kekuatan historis pada cerita.

Sejarah subjektif dalam perwujudannya mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah intelektual yang dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo, yaitu wilayah kajian yang mengacu pada *mentifact* salah satu dari tiga jenis fakta sejarah (*artifact* / benda, *socifact* / hubungan sosial, dan *mentifact*/kejiwaan), diantaranya adalah semua fakta yang terjadi dalam jiwa, pikiran, dan kesadaran, yang hanya terletak di benak penulis/pengarang yang sangat penting peranannya sebagai faktor penggerak atau pencipta fakta-fakta sejarah (Kartodirdjo, 1993:177).

Sejarah sebagai bagian dari seni pernah ditunjukkan eksistensinya. Pada penulisan sejarah zaman Romantik yaitu pada akhir abad ke- 18 dan awal abad ke-19, sejarah dianggap sebagai cabang sastra. Akibatnya menulis sejarah disamakan dengan menulis sastra, artinya menulis sejarah harus dengan keterlibatan emosional (Kuntowijoyo, 1999:69). Dengan kata lain unsur emosional menjadi sesuatu yang sangat subyektif yang dimiliki setiap individu. Keterlibatan emosional bisa menimbulkan ketidakobjektifan atau subjektif dalam memandang suatu permasalahan. Begitu pula seorang pengarang dalam mencurahkan pesan-pesan dalam karya sastra. Menurut Lukacs, dalam mengarang sebuah karya sastra

seorang pengarang akan mementingkan kepentingan kemanusiaan yang tidak ter-*expose* yang seringkali bukan merupakan sejarah 'besar' namun merupakan upaya membangkitkan kembali pengalaman sosial dan kemanusiaan (Lukacs, 1981:44).

Kuntowijoyo mengatakan bahwa peristiwa sejarah sering dicakup sebagai fakta sejarah. Yang membedakan antara fakta sejarah sebagai sejarah umum atau kolektif dengan sejarah intelektual adalah generalisasi dari fakta-fakta khusus yang menunjukkan gejala umum (Kuntowijoyo, 1987:129). Dengan kata lain bisa diartikan, bahwa dalam sejarah intelektual terdapat fakta-fakta khusus yang di dalam sejarah kolektif mendapat generalisasi.

Jika dipandang dalam konteks tersebut di atas, peristiwa sejarah *jugun ianfu* dalam *PRDCM* merupakan fakta khusus dari sebuah fakta umum. Pembahasan berikutnya akan diungkap sebuah konstruksi cerita yang merupakan konstruksi sejarah subjektif *jugun ianfu*.

3.2 Konstruksi Cerita sebagai Konstruksi Sejarah Subjektif pada *PRDCM*

3.2.1 *Jugun Ianfu* Merupakan Kehendak Jepang yang Terorganisasi

Tidak banyak dokumen-dokumen sejarah yang menceritakan kegiatan Jepang memobilisasi para perawan remaja untuk dijadikan 'pelacur'. Apalagi kisah penderitaan mereka selama di kompleks-kompleks pelacuran khusus tentara tersebut. Hal ini tidaklah mengherankan, karena bagi Jepang yang kalah perang akan berusaha menutupi kejahatan perang yang dilakukannya pada negara-negara yang dijajahnya. Negara-negara yang pada perang dunia II diduduki Jepang hampir mencakup keseluruhan Asia, mulai semenanjung Korea, Cina bagian

utara, Thailand, Burma, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain. Sebanyak itu pula Jepang membuka pelacuran dan menutupi kejahatannya pada saat ia kalah oleh sekutu (1945).

Sejarah mencatat selama masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) yang terjadi hanyalah kekejaman dan pemerasan, serta dilakukan terorganisasi melalui badan-badan propaganda, seperti *sendenbu*. Bisa kita lihat bagaimana *romusha* dilaksanakan, kewajiban mengangkat senjata bagi setiap pria remaja yang tergabung dalam peta atau *heiho*, termasuk *jugun ianfu*. Dalam pelaksanaannya juga dibuat peraturan-peraturan yang sepihak dibuat oleh penguasa tunggal, yaitu Jepang.

Hal ini tercermin dalam *PRDCM*, bahwa Jepang melakukan propaganda secara terstruktur. Namun dibalik propaganda tersebut tak lebih sebuah penipuan besar-besaran. Berikut kutipannya :

“Jadi *sendenbu* meneruskan janji Pangreh Praja. Para bupati meneruskannya pada para camat. Camat pada lurah. Lurah pada perabot desa dan penduduk. Sekali lagi dari mulut ke mulut. Semua berjalan di bawah pengawasan *kempeitai* dan alat-alatnya.”
(Toer, 2001:10)

“Tidak ada yang dapat mengatakan sudah berapa kali Jepang melakukan pengangkutan. Juga tidak jelas berapa puluh ribu perawan remaja yang telah diangkutnya sampai pada akhir kekuasaannya di Jawa.”
(Toer, 2001:16)

Para wanita *jugun ianfu* yang tengah berada di kompleks-kompleks yang dibangun Jepang, tidak akan bisa keluar karena ketatnya peraturan. Hal ini tercermin dalam *PRDCM*, berikut kutipannya:

“Setelah para perawan remaja itu jatuh dalam cengkeraman Jepang sulit bagi mereka untuk bisa melepaskan diri. Sejak pendaratannya di Jawa pada 1942 itu, Pemerintah Pendudukan Balatentara Dai Nippon menghidupkan kembali *Wijk en Passenstelsel VOC*. Jepang mengenaannya pada seluruh rakyat di Jawa.”
(Toer, 2001:11)

Pengarang novel ini telah menggambarkan bagaimana Jepang telah memobilisasi secara besar-besaran para perawan remaja. Indikasi jumlah puluhan ribu yang telah disebutkan mempunyai kesamaan dengan data yang diungkap *Tempo*, 25 Juli 1992 hal. 14, bahwa ada sekitar 60.000 wanita yang dijadikan *jugun ianfu*. Begitu juga dengan mekanisme perekrutan yang menggunakan organisasi khusus yaitu *sendenbu* mempunyai korelasi dengan realita objektif atau fakta sejarah di luar teks, yang membawa kesimpulan bahwa kegiatan ini merupakan kebijakan resmi Pemerintah Pusat Jepang di Tokyo.

3.2.2 *Jugun Ianfu*, Praktik Kekejaman dan Kejahatan Perang Jepang

Jugun ianfu yang mempunyai arti “wanita penghibur yang ikut tentara” (*Tempo*, 25 Juli 1992), merupakan kejahatan perang yang paling besar dalam sejarah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah korban dan akibat yang dialami oleh korban kejahatan perang ini. Puluhan ribu orang menjadi korban pemaksaan Jepang untuk menjadi ‘pelacur’, selain itu juga mengakibatkan sebagian besar diantaranya meninggal dunia, baik yang dibunuh oleh Jepang maupun bunuh diri karena tekanan jiwa yang teramat dalam. Belum lagi mereka yang mengalami cacat fisik seumur hidup serta cacat batin yang mendalam.

Pengarang *PRDCM* yang pernah bekerja pada kantor berita Domei Jepang, tampaknya mempunyai pengalaman-pengalaman khusus tentang kekejaman Jepang terhadap para *jugun ianfu*, baik yang diketahuinya sendiri maupun dari penuturan berbagai sumber. Berikut kutipannya:

“Air mata Sumiyati mulai bercucuran waktu kisah hidupnya sampai pada suatu bagian kala asramanya dengan 50 gadis dari Jawa, didatangi oleh sejumlah besar serdadu Jepang dan menggilir mereka gelombang demi gelombang. Setiap gadis mendapat satu bilik. Serdadu Nippon yang berhajad seks datang ke kamar... .”
(Toer, 2001:39)

Memang Jepang telah membuat bilik-bilik khusus, menurut data dari dokumen Kementerian Kesehatan Jepang (*Tempo*, 25 Juli 1992:15), seorang wanita bisa melayani 5-10 orang dalam satu hari tanpa bayaran.

Berita tentang kematian mereka juga diceritakan dalam *PRDCM*, bahkan sebagian dari mereka meninggal dunia di luar Indonesia, menandakan Jepang telah mengirim wanita-wanita kita ke berbagai negeri jajahannya. Berikut kutipannya:

“Dapat diduga sebagian terbesar para perawan remaja yang diangkut Jepang itu telah mati dalam penderitaan, tanpa disaksikan oleh orang-orang yang dikasihinya, tidak pernah mendapat kesempatan belajar sebagaimana dijanjikan dan mati di negeri yang jauh.”
(Toer, 2001:18)

Sesungguhnya kekejaman Jepang terhadap para wanita *jugun ianfu* tidak akan benar-benar terdokumentasi atau terekam dengan jelas, karena sebagian besar dari mereka tidak mau melaporkan peristiwa yang menimpanya. Pada tahun 1945 (pra agresi militer Belanda I) pernah terjadi proses peradilan pada Letnan

Jenderal Seiji Nozaki, disini terungkap semua data nama korban sengaja dihilangkan (*Tempo*, 25 Juli 1992).

3.2.3 Jepang Tidak Bertanggung jawab pada Eks *Jugun Ianfu*

Jepang menyerah kalah pada sekutu pada bulan Agustus 1945, negara matahari terbit ini meninggalkan semua penderitaan bagi bangsa Indonesia, termasuk para eks *jugun ianfu* yang tersebar ke seluruh bekas kamp-kamp militer Jepang, selain itu juga ada yang berada di luar negeri.

Bagi wanita-wanita Indonesia yang dikirim ke luar negeri, ketika Jepang menyerah kalah maka nasib mereka tidak menentu. Bagi sebagian mereka bahkan memilih untuk tidak pulang ke kampung halamannya. Berikut kutipannya:

“Setelah Jepang bertekuk lutut, gadis-gadis itu laksana anak ayam kehilangan induk. Hendak kembali ke Jawa tak tahu jalan, disamping itu juga tidak punya uang.”
(Toer, 2001:39)

“Mereka semua ingin pulang. Tak ada fasilitas. Tak ada uang. Tak ada pelindung. Tak ada kenalan. Di luar negeri. Tetapi banyak juga walaupun ingin pulang, merasa menanggung beban moral yang berat, merasa telah tercemar, dan tak sampai hati mencemari nama keluarganya.”
(Toer, 2001:39)

Selain itu Jepang benar-benar ingin menghilangkan jejak agar terbebas dari tuduhan kejahatan perang. Takut diketahui oleh sekutu, sebelum wanita-wanita itu dilepaskan dilakukan konsinye (larangan meninggalkan tempat, siap tugas sewaktu-waktu) ketat, berikut kutipannya:

“Jepang malah hendak menghapuskan semua jejak agar terbebas dari tuduhan melakukan kejahatan perang. Maka begitu kalah perang, Jepang segera membebaskan remaja itu, dilepaskan tanpa pesangon, tanpa fasilitas. Ini dilakukannya sebelum tentara

sekutu mengambil alih kekuasaan dan menerima penyerahan mereka. Di Buru, sebelum datangnya balatentara sekutu, para wanita itu dikenakan konsinye keras...”
(Toer, 2001:20)

Sebuah kejahatan perang yang dilakukan oleh suatu negara menurut konvensi internasional harus membayar pampasan perang. Bagi Indonesia menurut ahli hukum internasional Prof. Komar Kantaatmadja, menuntut kejahatan perang seperti *jugun ianfu* akan sia-sia saja karena pampasan perang yang ditandatangani Subandrio (mantan Menlu RI) dan Fujiyama (mantan Menlu Jepang) pada tahun 1958 sudah mencakup seluruhnya. Dalam perjanjian itu, pihak Jepang bersedia membayar 83 Milyar Yen lebih, yang dicicil selama 12 tahun. Kompensasi kerugian dan penderitaan rakyat Indonesia sudah tercakup di dalamnya (*Tempo*, 25 Juli 1992:15).

3.2.4 Keterasingan dalam Kehidupan Batin *Jugun Ianfu*

Keterasingan yang dimaksud dalam analisis ini adalah keterasingan kemanusiaan atau dehumanisasi, sebuah perasaan ketidakberdayaan, tidak bermakna, terencil, yang direnggutkan dari semua kualitas kemanusiaan (Kuntowijoyo, 1987:81). Keterasingan seperti tersebut di atas merupakan stimulus dari terciptanya respon kehidupan batin yang kuat, keteguhan hati dan heroisme dalam diri setiap manusia. Respons dari keterasingan dalam perwujudannya merupakan implementasi dari proses berpikir dialektis yang digambarkan tokoh-tokoh *jugun ianfu* dalam *PRDCM*.

Digambarkan dalam teks *PRDCM*, bahwa berdasarkan pada latar belakang kehidupan sosial mereka pada umumnya adalah putri dari pejabat-pejabat di

daerah asalnya di Jawa, mulai jurutulis kawedanan sampai lurah dan mantri polisi (Toer, 2001:17), jika akhirnya mereka harus hidup dengan suatu kultur yang jauh berbeda di tanah buangan seperti di Pulau Buru yang kondisi masyarakatnya masih primitif (1979) maka hal ini jelas akan menimbulkan *cultural shock* (trauma budaya) bagi mereka, apalagi mereka adalah kelompok minoritas di sekitar penduduk asli Pulau Buru. Seperti yang digambarkan oleh tokoh Mulyati, sebagai manusia yang mempunyai sejarah kebudayaan dalam suatu peradabannya sendiri telah mengalami suatu kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan budaya masa lalunya. Mulyati harus mengikuti adat suku asli Buru yang menganggap wanita sebagai harta kekayaan yang bisa diperjualbelikan maka unsur-unsur manusiawinya terenggut sistem sosial yang ada.

Sisi lain yang juga menjadi penyebab keterasingan tokoh-tokoh *jugun ianfu* ialah 'bekas-bekas' luka kejiwaan dan mental disebabkan perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang dilakukan militer Jepang. Implikasinya membawa dampak pada kondisi kejiwaan yang tertutup, terbebani oleh perasaan malu, serta putus asa. Keputusan yang sangat dalam bisa menyebabkan ketidakpercayaan pada dunia atas kehidupan yang lebih baik.

Digambarkan oleh tokoh Bolansar bahwa dirinya tidak akan pernah mau diajak pulang kembali ke Jawa dengan alasan dari tanah Buru ia memperoleh makan dan hidup, ia sudah melakukan sumpah adat akan setia pada adat. Tentunya hal ini merupakan pengingkaran yang berbau keputusan akibat penderitaan yang sangat mendalam yang terjadi pada diri Bolansar, karena sebetulnya ia mengalami siksaan batin yang hebat dengan hidup bersama orang-

orang Buru, dan kerinduan yang sangat dalam pada kampung halaman. Hal ini membuktikan indikasi sikap mental putus asa yang mencapai puncaknya hingga ia tidak percaya lagi akan ada kesempatan baginya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, perasaan *nrimo* atau pasrah pada kehidupan yang dialaminya merupakan pilihan terakhir bagi mereka para eks *jugun ianfu* untuk melanjutkan hidup

Pada akhirnya segala ekses dari dehumanisasi yang mengakibatkan pola mental yang tidak percaya pada dunia yang kemudian mengarah pada pengingkaran dunia yang dialami para pelaku sejarah *jugun ianfu* mengakibatkan sulitnya mendapatkan keberanian dari mereka untuk dihasilkan sebuah data peristiwa yang kompleks dan akurat sebagai bahan kajian sejarah.

PRDCM sebagai karya sastra telah memunculkan gambaran sejarah, cerita sejarah sebagai konstruksi sejarah subjektif tentang *jugun ianfu*. Seperti yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo, cerita sejarah, pengetahuan sejarah, gambaran sejarah, sebenarnya adalah sejarah dalam arti subyektif (Kartodirdjo, 1992:14).

Konstruksi cerita sebagai konstruksi sejarah subjektif yang tersebut di atas perlu dibandingkan dengan melakukan penelusuran pada naskah-naskah sejarah umum. Perbandingan atau usaha menghubungkan secara dialektik antara kedua realitas tersebut adalah hal yang penting, karena 'pengalaman tersembunyi' pengarang juga didapatkan dari realita objektif. Perbandingan ini ditujukan untuk mengetahui posisi dan proporsi sebagai suatu konstruksi cerita yang dibangun oleh penulis.

Penelusuran fakta sejarah *jugun ianfu* pada naskah-naskah sejarah dan data yang dilansir media masa, paling tidak membawa kita pada keyakinan bahwa fakta sejarah *jugun ianfu* masih kontroversial. Bagi penelitian ini dapat mengetahui berbagai versi fakta sejarah merupakan bahan pembanding antara realita objektif yang ditunjukkan dalam naskah-naskah sejarah dengan realita subjektif yang ditunjukkan dalam teks *PRDCM* yang tercermin melalui konstruksi cerita tersebut di atas.

3.3 Penelusuran Fakta Sejarah *Jugun Ianfu* pada Naskah-naskah Sejarah sebagai Realita Objektif atau Konteks Historis

Penelusuran fakta-fakta sejarah *jugun ianfu* ditujukan untuk mengetahui realita objektif tentang *jugun ianfu* yang mana proses selanjutnya adalah menghubungkannya dengan fakta sejarah pada teks *PRDCM* sebagai realita subjektif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui relasi antar keduanya, sehingga dapat diketahui maksud dari pengarang.

Dalam hal ini yang paling relevan untuk dijadikan alat pembanding antara fakta sejarah yang terdapat dalam *PRDCM* dengan yang di luar teks adalah naskah-naskah sejarah dalam kurun waktu 1942-1945 dan berbicara tentang jaman pendudukan Jepang di Indonesia pada khususnya, maupun secara makro Jaman Perang Dunia II.

Beberapa naskah sejarah induk yang di jadikan referensi penelitian ini dalam menelusuri fakta sejarah *jugun ianfu* adalah *Sejarah Nasional Indonesia VI* (1992) Nugroho Notosusanto, *Sejarah Indonesia Modern* (1998) M.C. Ricklefs.

dan *Perang Pasifik* (2001) P.K. Ojong. Selain beberapa dokumen sejarah tersebut juga dimanfaatkan data dari majalah *Tempo* edisi no. 21 tahun XXI, 25 Juli 1992.

Nugroho Notosusanto mengatakan bahwa *Sejarah Nasional Indonesia VI* merupakan buku *babon* (buku induk dalam penulisan sejarah) tentang sejarah kurun waktu jaman Jepang dan jaman Republik Indonesia (1942-1984) (Notosusanto, 1998:vii). Pada buku ini memuat data tentang: 1. Susunan dan perkembangan pemerintah pendudukan, yang memuat data-data tentang awal masuknya Jepang di Indonesia; 2. Pergerakan Indonesia dan Jepang; 3. Pengerahan terhadap rakyat, pada bagian ini memuat pengerahan pemuda (*Barisan Pemuda Asia Raya/BPAR, San A Seinen Kurensyo, Perkinjo*), organisasi semi militer (*Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Suishintai, Jibakutai*), organisasi militer (*Heiho, Peta*), dan secara khusus membicarakan *Romusha*; 4. Ekonomi perang; 5. Pendidikan, komunikasi sosial dan budaya; 6. Pra kemerdekaan (ibid: 1-83). Dari kesemua pokok bahasan diatas tidak disebutkan data aktual tentang fakta sejarah secara khusus tentang Jugun Ianfu di Indonesia.

Dalam *Sejarah Indonesia Modern* disebutkan fakta sejarah secara umum tentang kekejaman pendudukan Jepang pada rakyat Indonesia, diantaranya adalah perkosaan (tidak disebutkan secara kongkret tentang Jugun Ianfu), hal inilah yang menyebabkan propaganda Jepang mengalami kegagalan, selain perkosaan adalah kekaçauan ekonomi, teror polisi militer (*Kenpeitai*), kerja paksa dan penyerahan wajib beras, kesombongan dan kekejaman orang-orang Jepang. (Ricklefs, 1998:305). Dalam buku ini juga tidak ditemukan data-data tentang Jugun Ianfu di Indonesia.

Dalam *Perang Pasifik* sesuai dengan namanya buku ini bertemakan sejarah perang pasifik yang meliputi Filipina, Malaya (Malaysia) dan Indonesia yang saat itu dikuasai oleh sekutu. Di dalam buku ini dimuat fakta tentang kekuasaan militer Jepang yang tidak hanya di medan perang saja, tapi sudah merambah pada pemerintahan di negaranya. Menteri-menteri bahkan perdana menteri Jepang yang suka damai dibunuh oleh kaum militer Jepang yang lebih berkuasa daripada parlemen dan dibawah selimut hormat terhadap Tenno Heika. yang sebetulnyapun memerintah kaisarnya (Ojong, 2001:324). Fakta secara umum dalam buku ini tentang kekejaman militer Jepang dalam bentuk perkosaan di daerah yang diduduki, disebutkan bahwa ketika militer Jepang menduduki Tiongkok pada tahun 1937 yang pada saat itu dianggap oleh mereka sebagai upaya menjamin 'perdamaian', padahal wanita-wanita di Nanking saat itu diperkosa oleh serdadu-serdadu Jepang yang kemudian dikenal dengan peristiwa "The Nanking Rape", sebuah peristiwa Jugun Ianfu di daratan Cina. (Ojong, 2001:324).

Bukti-bukti tentang *jugun ianfu* sangat sulit didapatkan dan dikemukakan ke publik. Hal ini dikarenakan usai Perang Dunia II dengan kekalahan yang dialami oleh Jepang, negara ini berusaha menutupi peristiwa ini sebagai salah satu kejahatan perang yang telah dilakukan oleh Jepang.

Pada awal bulan Desember 1991, Menteri Sekretaris Negara Jepang. Koichi Kato menyatakan bahwa tidak ada dokumen yang menyatakan adanya paksaan terhadap para 'wanita penghibur' itu. Pernyataan ini guna

menyelamatkan muka Jepang atas gugatan eks *jugun ianfu* dari Korea Selatan (*Tempo*, 25 Juli 1992:14).

Yoshiaki Yoshimi (ahli sejarah dari Universitas Chuo Jepang) mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen rahasia dari Badan Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pendidikan Jepang. Dari penelitian ini terungkap keterlibatan tentara Jepang melalui Kepala Staf Komando Tentara Jepang agar membuka rumah-rumah pelacuran atau bordil di setiap wilayah jajahan. Alasannya untuk mencegah terjadinya pemerkosaan terhadap penduduk lokal oleh tentara Jepang, menjaga moral pasukan, serta mencegah tersebarnya penyakit kelamin. Di Indonesia sendiri diperkirakan ada 60.000 wanita *jugun ianfu*, tapi diduga hanya 25 % yang masih hidup (*Tempo*, 25 Juli 1992:14-15).

Perkiraan jumlah yang besar tersebut besar kemungkinannya ada kebijakan resmi dari Jepang tentang pengerahan masal atau mobilisasi para wanita di Indonesia saat itu. Pengerahan yang berbaur dengan penipuan dilakukan dengan kedok beasiswa sekolah di Tokyo. Tidak mengherankan jika yang mendaftar kebanyakan anak-anak orang kaya atau berpangkat.

Data-data yang dilansir *Tempo* dari beberapa dokumen yang sangat rahasia tersebut masih digolongkan sebagai fakta 'lunak', artinya fakta yang untuk jangka waktu lama belum mantap atau masih lunak, seperti pembunuhan J.F. Kennedy yang masih sangat kontroversial siapa pembunuhnya (Kartodirdjo, 1993:17). Khusus masalah *jugun ianfu* fakta-fakta sejarah yang ada masih banyak mengandung perdebatan versi. Pihak Jepang masih mempertahankan asumsi

bahwa para *jugun ianfu* melakukannya dengan sukarela, sedangkan bagi para korban jelas-jelas mereka mengaku dipaksa, ditipu, dan dianiaya. Hal ini dikarenakan fakta merupakan produk dari memorisasi tiap-tiap subjek, disinilah hakikatnya fakta sebagai sejarah subjektif.

Maka setelah diketahui konstruksi sejarah subjektif serta konteks historis atau realita sejarah objektif maka pada gilirannya akan menuju pada refleksi realitas sosial yang “menembus waktu” sebagai implikasi kesadaran historis yang menghubungkan antara peristiwa masa lampau dengan peristiwa masa kini.

3.4 Refleksi Realitas Sosial *Jugun Ianfu* dalam *PRDCM* terhadap Perempuan di Aceh pada Masa DOM

Refleksi realitas sosial yang tertransformasikan dalam karya sastra dipengaruhi totalitas pengarang. Sebuah totalitas pengarang harus dilihat melalui realitas yang tampak dan esensi yang tak tampak atau kehidupan duniawi dan transendental. Realitas yang tampak adalah realitas yang bisa dipahami sebagai kondisi sosial dalam masyarakat, sedangkan realitas yang tak tampak adalah pikiran pengarang yang ditransformasikan dalam karya sastra. Artinya totalitas pengarang adalah wilayah pemikiran antara aku dan realitas bersamaku (Karyanto, 1997:76).

Lukacs mempergunakan istilah ‘cermin’ dalam keseluruhan karyanya, mencerminkan sesuatu berarti menyusun sebuah struktur mental. Sebuah novel tidak hanya mencerminkan ‘realitas’ tetapi lebih dari itu memberikan kepada kita “sebuah refleksi realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih

dinamik” yang mungkin melampaui pemahaman umum (Selden, 1991:27 dalam Taum, 1995:50).

Dalam upaya menangkap refleksi realitas sosial dalam karya sastra terlebih dahulu diketahui realitas sosial yang terkandung di dalamnya, yang tentunya realitas dalam sebuah karya sastra merupakan realitas yang tidak sempurna. Realitas sosial adalah sebuah kebenaran (*truthness*). Kebenaran dalam karya sastra akan sangat tinggi nilainya bila mengandung sebuah kenyataan adanya penderitaan, keterasingan dan kecacatan manusia.

Hal-hal yang menjadi kebenaran (*truthness*) kehidupan batin manusia tersebut merupakan unsur yang terdapat di dalam novel sejarah khususnya keaslian sejarah (Lukacs,1981:45). Kebenaran dalam sebuah novel sejarah bisa dipandang sebagai produk pengolahan informasi dan pengalaman yang melalui penginderaan pengarang dan memberikan interpretasi di atasnya.

Tujuan dari sebuah interpretasi adalah mengungkap kebenaran di atas kebenaran dan sebuah kebenaran peristiwa belum tentu merupakan fakta, fakta sebenarnya telah merupakan produk dari proses mental sejarawan atau memorisasi (Kartodirdjo, 1993:17). Terkadang kesadaran manusia ditutupi oleh kepalsuan yang bisa saja dilakukan oleh pihak penguasa terlebih jika fakta itu nantinya bisa menjadi pengancam kekuasaannya. Pengarang sebagai pencipta karya sastra mempunyai peranan dalam mengungkap kebenaran yang berdasar pada kenyataan penderitaan masyarakat. (Karyanto, 1997:97) Karya seni ataupun karya sastra mempunyai daya komunikasi yang menjebol kepalsuan kesadaran manusia.

Lukacs dalam teorinya mengatakan tidak ingin mengasingkan kesadaran manusia, masyarakat mampu memahami realitas kehidupannya sendiri.

Setiap manusia mempunyai potensi berpikir dialektis. (Fokkema, 1998: 168) Berpikir dialektis dapat memberikan wawasan tertentu terhadap totalitas masyarakat dan memecah isolasi fakta artifisial atau buatan dan berbagai masalah. Sebuah karya sastra yang lahir dari sebuah kesadaran manusia tak lepas dari kesadaran pengarang itu sendiri sebagai bagian dari masyarakat, baik kesadaran pada diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Refleksi realitas sosial sebagai topik dalam bab ini memiliki nilai-nilai historis yang jika dianalisis dengan metode dialektis maka perwujudannya akan berupa model saling hubung (relasi) antara fakta sejarah yang ada dalam teks dengan yang ada di luar teks.

Model saling hubung ini digambarkan dalam *PRDCM* sebagai protes kelas sosial masyarakat 'buangan' terhadap penguasa. Kelas masyarakat buangan terwakili oleh para eks *jugun ianfu* dan tapol di Pulau Buru, sedangkan penguasa adalah pemerintah Indonesia.

Dalam karya yang mempunyai aspek dialektis pada fakta historis mempunyai dimensi teleologis atau perspektif tujuan, sasaran masa depan. Perspektif tujuan, sasaran masa depan, artinya fakta dalam kurun waktu tertentu berhubungan atau dihubungkan dengan fakta pada kurun waktu yang melampauinya. Salah satu metode dialektis yang diterapkan oleh Hegel adalah pemusatan pada hubungan antara yang umum dan yang individual dalam pemampatan historisnya. Pemampatan historis adalah memasukkan setiap

fenomena ke dalam konteks sejarah yang tidak hanya memiliki masa lampau tetapi juga masa depan (Fokkema, 1998:169).

Benang merah yang dapat ditarik dalam melihat relevansi antara *PRDCM* dengan gejala-gejala sosial sebagai sesuatu yang fenomenal dalam masyarakat adalah persoalan militer dan kekerasan seksual. Gambaran militer Jepang sebagai simbol alat kekuasaan, alat perang dan alat intimidasi yang terdapat dalam *PRDCM* mempunyai hubungan secara kontekstual dengan peristiwa DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh yaitu sama-sama menggambarkan militer (bisa diistilahkan sebagai aparat, angkatan bersenjata, tentara, intelejen, dan lain-lain) sebagai pelaku kekerasan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Komando maupun diluar garis komando yang dalam hal ini dilakukan oleh oknum-oknum yang melakukan tindak kekerasan seksual atas dasar subyektivitas perorangan. Langsung berarti ditemukan fakta di lapangan dilakukan oleh oknum. Tidak langsung bisa diartikan sebagai tindakan intelejen. Dalam merunut hubungan teks dengan struktur sosio historis diangkat hal-hal yang menunjukkan relasi dengan teks *PRDCM*. Persamaan ini ditelusuri lewat teks dan referensi data yang terkait dengan permasalahan tersebut. Hal ini bisa dilihat pada bagan yang menunjukkan faktor-faktor relasi antara kekerasan seksual yang dilakukan militer Jepang pada kurun waktu 1943 - 1945 (tergambar dalam *PRDCM*) dengan yang dilakukan militer Indonesia (ABRI/TNI) pada tahun 1989 - 1999, pada saat diberlakukannya DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh (sekarang berubah menjadi Nangroe Aceh Darussalam sejak tahun 2001)

KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 1943 –1945	KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 1989 – 1999
1. Dilakukan oleh militer Jepang. 2. Objek kekerasan seksual adalah perempuan-perempuan Indonesia terutama di Jawa. 3. Cara-cara yang dilakukan terorganisir. 4. Motif; pemenuhan kebutuhan biologis.	1. Dilakukan oleh militer Indonesia. 2. Objek kekerasan seksual adalah perempuan-perempuan Indonesia khususnya di Aceh. 3. Cara-cara yang dilakukan ada yang terorganisir. 4. Motif; politik

3.4.1 Militer sebagai Pelaku Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang dilakukan militer Jepang pada kurun waktu tahun 1943 - 1945 telah menambah deretan panjang korban perang dunia II. Korban-korban kekerasan seksual pada masa ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi juga di negara-negara jajahan Jepang yang lain seperti Taiwan, Korea, Burma, Filipina dan lain-lain. Kekejaman Jepang pada perempuan-perempuan Indonesia seperti yang dipaparkan oleh Aku bahwa perempuan-perempuan itu telah mati dalam penderitaan (Toer, 2001:18). Pulau Jawa memang saat itu menjadi pusat pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon di Indonesia yang dikuasai Angkatan Darat Jepang, tidaklah mengherankan jika badan-badan hasil bentukan Jepang banyak di Jawa, baik yang bersifat militer maupun non militer. *Sendenbu* sebuah

jawatan propaganda Jepang menjadi alat dalam menjaring perempuan-perempuan di Jawa dengan dalih akan mendapatkan pendidikan di luar negeri, tentunya hal ini disertai intimidasi dan paksaan dari militer Jepang yang berkuasa (Toer,2001:9). Kalau dilihat dari situasi perang Asia Pasifik yang sangat menegangkan antara Jepang dengan Sekutu saat itu maka alasan pengumpulan perempuan-perempuan untuk dijadikan 'budak seks' bagi tentara Jepang maka semata-mata adalah pemenuhan kebutuhan biologis dari tentara Jepang yang tersebar di berbagai wilayah jajahan Jepang saat itu.

Peristiwa kekerasan seksual di Aceh sebenarnya merupakan rentetan dari bentuk-bentuk kekerasan militer yang lain. Dalam kurun waktu 1989 - 1998 (selama berangsurnya DOM / Daerah Operasi Militer di Aceh) laporan tentang perkosaan berjumlah 128 kasus (*Sumber Forum Peduli HAM Aceh, 1999*) hampir semuanya mendapatkan kesaksian dari penduduk setempat bahwa yang melakukan adalah oknum-oknum aparat yang bertugas disana. Nur Syahbani Katjasungkana aktivis LSM yang bergerak dalam pembelaan hak-hak perempuan, mengatakan bahwa tentara dan perkosaan sudah menjadi bagian dari alat perang di Aceh dalam menumpas GAM (Gerakan Aceh Merdeka) (Eda, 1999:24)

Ditinjau dari awal mula terjadinya berbagai kekerasan di Aceh adalah rasa ketidakadilan dalam pembagian hasil alam bagi rakyat Aceh dengan pemerintah pusat. Serta kebanggaan historis Aceh sebagai wilayah yang tidak pernah mengalami penjajahan dan berjaya dalam perdagangan dunia telah dimanfaatkan sekelompok orang Aceh untuk membentuk negara sendiri. Kondisi demikian ini tidak dapat diatasi oleh pemerintah orde baru dengan baik, yang akhirnya

menimbulkan perlawanan oleh sekelompok orang di Aceh yang menyebut kelompoknya sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah lebih memilih jalan operasi militer dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dengan diberlakukannya DOM di Aceh maka cara-cara represif yang diterapkan kerap kali menyengsarakan rakyat Aceh.

Bahwa relasi antara fakta sejarah yang terjadi pada militer Jepang yang digambarkan pada teks *PRDCM* dengan militer di Indonesia yang ditugaskan di Aceh menimbulkan suatu makna yang bisa ditarik sebagai simbol kekerasan yang sama yaitu militer.

3.4.2 Perempuan sebagai Objek Seksual

Sumiyati asal Kediri tidak mau kembali ke kampung halamannya karena masyarakat di kampung halamannya hanya mengetahui kalau Sumiyati pergi ke luar negeri untuk sekolah. Setelah semua penderitaan yang ia terima, kini ia memilih hidup di tanah buangan (Toer,2001:40).

Gambaran tokoh Sumiyati ini merupakan gambaran fakta sejarah yang dialami para *jugun ianfu* pada pasca pendudukan Jepang di Indonesia. Rasa menanggung malu dan tekanan batin justru menjadi penderitaan tersendiri bagi mereka setelah selama hampir dua tahun mereka mengalami kekerasan seksual. Hal ini terlihat pada pengakuan Mardiyem eks *jugun ianfu* yang waktu itu dibuang di Kalimantan Selatan oleh Jepang. Diungkapkan oleh LBH Yogyakarta bahwa bagi para *jugun ianfu* segala penyiksaan yang dilakukan Jepang telah membuat luka abadi bagi mereka. Dalam pengakuan Mardiyem (salah seorang

pelaku sejarah *jugun ianfu*) pada LBH Yogyakarta (Hartono, dkk:241) pernah suatu ketika dirinya hamil akibat salah seorang tentara Jepang bernama Ichada tidak memakai alat kontrasepsi kondom yang disediakan kepala asrama. akibatnya Mardiyem dipaksa untuk menggugurkan kandungannya, bahkan cara yang dilakukan oleh dokter-dokter Jepang sungguh tidak manusiawi. perut Mardiyem di-'*plenet*' atau ditekan sampai bayi dalam kandungannya keluar. ia merasakan sakit yang bukan main hebatnya.

Pengarang rupanya benar-benar memahami realitas sosial *jugun ianfu* di Indonesia. Bagi pengarang diceritakannya kisah *jugun ianfu* dengan latar belakang Pulau Buru merupakan upaya membuat cerita seolah-olah buku harian dari kisah-kisah riil. *jugun ianfu* memang salah satu penggalan sejarah yang minim sekali data ataupun keterangan dari saksi-saksi sejarah, karena saksi sejarah yang paling penting disini adalah para *jugun ianfu* itu sendiri. Tidaklah heran jika saksi pelaku sejarah ini sulit sekali ditemukan atau dimintai kesaksiannya karena mereka nyata-nyata berbeda dengan para pelaku sejarah yang lain yang kerap kali menyandang sebutan pahlawan, tetapi mereka adalah gadis-gadis atau perawan-perawan pada awalnya, yang dijadikan budak seks oleh Jepang karena paksaan dan intimidasi jika kemudian mereka harus menuturkan kondisi mereka yang sudah tidak perawan lagi serta penderitaan yang mereka alami tampaknya itu merupakan hal yang sangat berat.

Refleksi realitas sosial antara fakta sejarah yang ada di *PRDCM* dengan realitas sosial di Aceh khususnya mengenai perempuan sebagai objek kekerasan militer bisa kita lihat secara keseluruhan dari data yang dikumpulkan oleh

organisasi-organisasi non pemerintah (LSM) maupun organisasi bentukan pemerintah (Komnas HAM) menyebutkan angka yang cukup signifikan tentang korban perkosaan yang terjadi di Aceh. Menurut sumber dari *Forum Peduli HAM Aceh* jumlah kasus perkosaan selang waktu antara tahun 1989 - 1998 mencapai angka 128 kasus, sedangkan menurut sumber dari *Tim Pencari Fakta Komnas HAM* dengan rentang waktu yang sama jumlah kasus perkosaan di Aceh mencapai 102 kasus (Eda. Dkk, 1999:15). Menurut data tersebut perkosaan dilakukan oleh oknum-oknum militer pada saat diberlakukannya DOM di Aceh. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa perempuan selalu menjadi objek kekerasan yang mana lebih bersifat sebagai korban

3.4.3 Kekerasan yang Terorganisasi

Pemerintah Jepang di Indonesia saat itu mempunyai jawatan propaganda yang bertugas mempengaruhi, mengajak rakyat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik melawan sekutu. Berbagai organisasi dibentuk, baik di bidang pendidikan, kemiliteran, kesehatan, dan lain-lain. Pada umumnya mereka (*para jugun ianfu*) 'ditipu' oleh pemerintah Jepang di Indonesia dengan dalih akan disekolahkan ke luar negeri, tujuan sebenarnya tak lain untuk menghubungkan para tentara Jepang di garis depan yang saat itu (1943-1944) mengalami kondisi peperangan yang memuncak.

Berikut kutipan pembicaraan tokoh Aku :

"..... bahwa pada 1943 Pemerintah Pendudukan Balatentara Dai Nippon di Jawa telah mengeluarkan janji melalui *Sendenbu* untuk memberi kesempatan pada para perawan remaja melanjutkan sekolah di Tokyo dan Shonanto. Bahwa sejak 1943 itu mereka

mulai mengangkut para perawan dengan tujuan Tokyo dan Shonanto.”
(Toer,2001:15)

Jadi jelaslah bahwa fakta yang digambarkan dalam *PRDCM* memaparkan sebuah operasi ‘penipuan’ yang terorganisir karena dilakukan melalui sebuah skenario lewat badan yang dinamakan *Sendenbu*. Refleksi pengorganisasian kekerasan seksual yang tampak di Aceh terlihat pada kerangka besar strategi penumpasan GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) atau GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh yang disebut dengan DOM (Daerah Operasi Militer) yang diberlakukan sejak tahun 1989 - 1998.

Pada bentuk kekerasan seksual di Aceh mempunyai motif politik. Diawali dengan makin meluasnya dan makin kuatnya gerakan GAM di pelosok wilayah Aceh maka diberlakukannya DOM. Dalam pelaksanaan operasi militer ini sangatlah tidak manusiawi, paling tidak hal ini yang disuarakan oleh lembaga-lembaga HAM baik yang dari pemerintah maupun non pemerintah. Nursyahbani Katjasungkana, S.H. (Direktur LBH-Apik) dalam sebuah wawancara dengan Tabloid *asasi* pada tanggal 15 Maret 1999 mengatakan bahwa ada sebuah perencanaan penindasan sistematis terhadap kaum perempuan di Aceh karena perempuan Aceh mempunyai sejarah kepahlawanan yang hebat. “Tentara dan perkosaan sudah menjadi bagian dari alat perang itu sendiri,” tegasnya. (Fikar W. Eda, *Aceh Menggugat*, 1999:245).

3.4.4 Motif Kekerasan Seksual

Permasalahan seksual rupa-rupanya telah menjadi kebutuhan yang nature atau alami bagi setiap manusia. Pemerolehan kebutuhan ini ada berbagai macam, ada yang legal atau sesuai dengan kaidah dan kebiasaan umum manusia di dunia bahwa seorang laki-laki dan wanita dewasa akan melangsungkan pernikahan sebagai jalan resmi yang diakui oleh norma, adat, dan religi untuk melakukan hubungan seksual. Namun juga ada yang dilakukan diluar jalur resmi, misalnya pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan wujud konkret dari kekerasan seksual. sebagaimana yang dialami oleh *jugun ianfu* dan perempuan-perempuan di Aceh. Mereka diperkosa oleh oknum-oknum militer.

Gambaran pemerkosaan terhadap para perawan remaja yang dilakukan tentara Jepang seperti yang digambarkan dalam *PRDCM* mempunyai motif pemenuhan kebutuhan biologis, artinya tidak ada maksud lain kecuali kebutuhan alamiah tersebut. Jepang memanfaatkan kondisi yang kondusif dari para pemimpin bangsa Indonesia saat itu. Melalui jawatan propaganda Pemerintah Jepang memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan biologis para tentaranya. Namun bagaimanapun hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (*gross violation of human right*), bahkan dalam perjalanan sejarah Jepang telah menghilangkan jejak-jejak penganiayaan terhadap perempuan-perempuan di daerah jajahannya, karena khawatir dituntut melakukan pengadilan kejahatan perang setelah Jepang menyerah kalah pada sekutu (1945).

Jepang telah menjadikan perawan-perawan remaja Indonesia tak ubahnya 'pelacur', dengan didirikannya asrama bagi mereka yang tentunya akan

memudahkan serdadu Jepang memenuhi kebutuhan seks. Berikut kutipan pembicaraan tokoh Sumiyati yang dituturkan kembali oleh Sukarno Martodihardjo:

“Airmata Sumiyati mulai bercucuran waktu kisah hidupnya sampai pada suatu bagian kala asramanya dengan 50 gadis dari Jawa, didatangi oleh sejumlah besar serdadu Jepang dan mengalir mereka gelombang demi gelombang... Setiap gadis mendapat satu bilik. Serdadu Nippon yang berhajad seks datang ke kamar yang ditentukan pada karcis yang berisikan nomor bilik. Mereka yang belum dapat giliran harus menunggu sampai yang di dalam keluar.”

(Toer, 2001:39)

Refleksi yang dapat ditangkap pada realitas di Aceh adalah bahwa di wilayah DOM juga terjadi kasus perkosaan yang menurut data Komnas HAM mencapai 102 yang ditemukan bukti-bukti materiil berupa penuturan dan pemeriksaan para saksi hidup yang mengatakan keterlibatan oknum-oknum militer (ABRI). Baharuddin Lopa (Ketua Komnas HAM 1998) pernah menjelaskan pada harian Serambi Indonesia dari hasil pantauannya mengenai kasus perkosaan yang dialami ratusan wanita Aceh, bahwa ada bukti keterlibatan aparat keamanan dan juga telah didapatkan pengakuan para saksi korban, meskipun hal ini dibantah oleh pihak ABRI. “Sambil menangis mereka mengaku telah diperkosa dan memperlihatkan anak hasil perkosaan itu,” kata Lopa. (Eda, 1999:172).

Eros Djarot (Pimpinan Redaksi Tabloid Detak dan Sutradara Film Tjut Njak Dhien) dalam wawancara dengan Harian Serambi Indonesia memberikan pengamatannya atas sebuah strategi militer yang terlalu berlebihan. Operasi militer DOM tersebut dikatakan olehnya terlalu memberikan tekanan pada

pendekatan intelejen, dimana setiap orang (di Aceh) dicurigai sebagai musuh termasuk para wanita Aceh (Eda, 1999:225). Memang fakta yang ditemukan di lapangan membenarkan indikasi mengarah ke sebuah tindak kekerasan yang melibatkan militer. Pengakuan dari para saksi korban bahkan ada yang mengaku ditelanjangi dan alat vitalnya disetrum oleh aparat militer karena dicurigai sebagai anggota GAM (Eda, 1999:124).

Pada akhirnya “pengalaman tersembunyi” pengarang dalam menyikapi peristiwa sejarah *jugun ianfu* yang sekaligus merupakan konstruksi sejarah subjektif pengarang terungkap dalam sebuah konstruksi cerita, yaitu: dimulai dari awal mula kebijakan Jepang tentang *jugun ianfu* yang terorganisasi. Kekejamannya terhadap perawan remaja Indonesia merupakan sebuah kejahatan perang, berlanjut pada masa kekalahan Jepang atas sekutu dan Jepang tidak bertanggung jawab atas perawan remaja Indonesia, hingga menimbulkan keterasingan dalam kehidupan batin mereka. Relasi kekerasan seksual yang dialami *jugun ianfu* pada kurun waktu 1943-1945 dengan yang dialami perempuan-perempuan Aceh pada kurun waktu 1989-1999, menunjukkan refleksi realitas sosio historis sebagai cerminan totalitas, tipikalitas, serta kekuatan historis yang satu sama lain saling berkaitan.

BAB IV

PENUTUP